

## ABSTRAK

**Shahira Mutiara Rizky. NIM 1223030113. 2026: Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Penerapan Norma Transparansi dan Keadilan Prosedural Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Kasus Penggusuran Lahan Bersertifikat Hak Milik di Kabupaten Bekasi.**

Penelitian ini dilakukan berdasarkan fenomena ketimpangan dalam penerapan norma transparansi dan keadilan prosedural pada pelaksanaan pendaftaran tanah yang berujung pada penggusuran lahan bersertifikat hak milik di Kabupaten Bekasi. Permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini meliputi proses pengaturan pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, penerapan norma keadilan prosedural dalam praktik penggusuran, serta kesesuaian pelaksanaannya dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Proses pengaturan pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 2) Penerapan norma transparansi dan keadilan prosedural dalam kasus penggusuran lahan bersertifikat hak milik di Kabupaten Bekasi; 3) Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penerapan norma transparansi dan keadilan prosedural tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori antara lain; Teori Keadilan, Teori Kepastian Hukum, Teori Perlindungan Hukum, serta Teori Siyasah Dusturiyah terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta dampak yang timbul dari penerapannya dalam kasus penggusuran tanah bersertifikat.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan menghimpun dan menganalisis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi dokumen. Analisis data selanjutnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan tinjauan siyasah dusturiyah.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Secara normatif, mekanisme pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah mengatur tahapan pengumpulan data fisik dan yuridis, pengumuman sebagai bentuk asas publisitas, pembukuan hak, hingga penerbitan sertifikat sebagai alat bukti yang kuat; 2) Penerapan norma transparansi dan keadilan prosedural dalam kasus penggusuran di Kabupaten Bekasi belum sepenuhnya berjalan optimal, terutama dalam aspek verifikasi objek sengketa, koordinasi antar lembaga, serta perlindungan terhadap pemegang sertifikat sah, sehingga menimbulkan ketidakadilan substantif; 3) Analisis tinjauan siyasah dusturiyah menunjukkan bahwa praktik tersebut belum sepenuhnya selaras dengan prinsip al-'adalah (keadilan), asy-syura (musyawarah), al-amanah (tanggung jawab), serta al-maslahah (kemaslahatan), khususnya dalam perlindungan terhadap hifz al-mal dan hifz al-nafs.

**Kata Kunci:** Pendaftaran Tanah, Keadilan Prosedural, Transparansi, Penggusuran, Siyasah Dusturiyah.